

## **Peninjauan Terhadap ICC Yang Hendak Dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan Terhadap Putin Atas Kejahatan Perang Ukraina**

**Safa Kamila Yuliana<sup>1</sup>, Raden Ristie Dwi Jayanti<sup>2</sup>, Nurul Anisah<sup>3</sup>, M. Arya Ramadhan<sup>4</sup>,  
Herli Antoni<sup>4</sup>**  
[afakamiyuliana19@gmail.com](mailto:afakamiyuliana19@gmail.com)  
**Universitas Pakuan**

### *Abstract*

*War crimes are heinous acts committed during war, they became increasingly well known as a result of the world wars and subsequent efforts to hold criminals responsible for the crimes. War Crimes include violations of International Humanitarian Law. On March 18 2023, the International Criminal Court (ICC) issued an arrest warrant against Russian President Vladimir Putin on charges of committing war crimes in Ukraine. The UN commission also noted findings of sexual and gender-based violence committed by Russian authorities when they carried out house-to-house visits in areas under their control, and during the unlawful confinement and transfer of children from Ukraine to the Russian Federation. The arrest of Vlandimir Putin and other Russian officials for legal proceedings was carried out by the International Criminal Court because the Russian state had no desire to arrest and try the President and its own state officials. Therefore, the International Criminal Court must act to adjudicate in the legal interests of the whole world. The Universality Principle states that criminal law can be applied to anyone who violates legal interests throughout the world.*

**Keywords:** War Crimes, International Criminal Court, Vlandimir Putin.

### **Abstrak**

Kejahatan Perang adalah tindakan keji yang dilakukan pada saat perang, kejahatan perang menjadi semakin dikenal sebagai akibat dari perang dunia dan upaya berikutnya untuk menuntut tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan. Kejahatan Perang termasuk pada pelanggaran Hukum Humaniter Internasional. Pada tanggal 18 Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Ukraina. Komisi PBB juga mencatat temuan dan kekerasan berbasis seksual dan gender yang dilakukan oleh otoritas Rusia ketika mereka melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di daerah yang berada dibawah kendali mereka, dan selama pengurangan yang melanggar hukum. adanya pemindahan anak – anak dari Ukraina ke Federasi Rusia. Penangkapan Vlandimir Putin dan Pejabat Rusia lainnya untuk diproses hukum dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional karena tidak ada keinginan negara Rusia untuk menangkap dan mengadili Presiden dan pejabat – pejabat negaranya sendiri. Oleh karena itu, Mahkamah Pidana Internasional harus bertindak mengadili guna kepentingan hukum seluruh dunia. Asas Universalitas menyatakan bahwa undang – undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia.

**Kata Kunci:** Kejahatan Perang, Mahkamah Pidana Internasional, Vlandimir Putin.

### **PENDAHULUAN**

Pelanggaran berat hukum humaniter internasional (“HHI”) adalah sebuah pelanggaran yang bersifat serius yang dikategorikan sebagai kejahatan perang. Penggunaan terminologi pelanggaran berat mengacu pada Konvensi Jenewa 1949 yang dikenal dengan grave breaches. Sedangkan dalam hukum hak asasi manusia (“HAM”) dikenal dengan istilah gross violation. Namun, dalam perkembangannya, Statuta Roma 1998 lebih memperjelas bahwa yang

dimaksud dengan pelanggaran berat HHI adalah kejahatan perang, dan dikenal dengan the most serious crimes. Istilah kejahatan perang menjadi semakin dikenal sebagai akibat dari perang dunia dan upaya berikutnya untuk menuntut tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan. Kejahatan perang adalah tindakan-tindakan keji yang dilakukan pada waktu perang, dan merupakan pelanggaran terhadap HHI, dan karenanya pelaku dapat dihukum. Karena, pada dasarnya HHI memiliki aturan dasar.<sup>1</sup>

Hukum Humaniter Internasional adalah bagian dari hukum public internasional yang mengatur konflik – konflik bersenjata ( *the law of armed conflict, LOAC*), adalah bagian dari hukum public internasional yang mengatur konflik- konflik bersenjata ,baik yang bersifat internasional,kemudian singkat HHI hadir diinspirasi oleh pertimbangan- pertimbangan kemanusiaan.HHI ditujukan untuk meminimalkan penderitaan mereka yang tidak atau tidak lagi mengambil bagian dalam pertempuran (peperangan) dan untuk membuat pertempuran menjadi lebih manusiawi (*humane*) dengan membatasi penggunaan senjata- senjata yang biadab dan kejam.<sup>2</sup>

Konflik antara Rusia serta Ukraina yang memanas pengaruhi bermacam hal, di antara lain pada perdagangan minyak bumi serta politik dan hukum. Konflik yang sudah terangkai mulai dari tahun 1991 semenjak kejatuhan Uni Soviet ini menggapai puncaknya kala Rusia mengibarkan bendera perang. awalnya, dalam beberapa kesempatan, Zelensky berulang kali mengungkapkan dirinya akan menjadikan Ukraina menjadi anggota Uni Eropa dan NATO ( pakta alhasil Atlantik Utara), itu menunjukkan dia bukan antek Rusia. Alhasil respon Rusia sampai pada puncaknya dengan mempublikasikan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari 2022 yang bertujuan demiliterasi, delimitasi, dan denzifikasi untuk mengambil alih seluruhnya. Bersamaan dengan statement Kepala negara Rusia ialah Vlandimir Putin yang mengakui deklarasi kemerdekaan dari Donest dan Luhansk atas Ukraina.Putin berpikiran kalau dengan bergabungnya Ukraina ke Nato hendak mengancam independensi Negeri Rusia, sebab bila Ukraina yang berbatasan langsung dengan Rusia dan bersosiasi dengan NATO, maka dianggap NATO hendak membuat pos militer yang berbatasan langsung dengan Rusia. Rusia melancarkan agresi ke Ukraina serta mengadakan serbuan dari segala penjuru. Hal ini dianggap sebagai “ Perang Putin” oleh semua negara.<sup>3</sup>

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan Rusia di Ukraina, Surat perintah tersebut juga dikeluarkan terhadap Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Komisaris Hak Anak di Kantor Presiden Federasi Rusia, atas tuduhan serupa,Meskipun demikian, ICC tidak memiliki petugas penegak hukum (polisi) sendiri untuk menjalankan surat perintah tersebut, sehingga pelaksanaannya bergantung pada masyarakat internasional.<sup>4</sup>Ukraina bukan anggota ICC, tetapi telah memberikan yurisdiksi ICC atas wilayahnya, dan jaksa ICC Karim Khan telah mengunjungi Ukraina empat kali sejak membuka penyelidikan setahun lalu Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyambut baik

---

<sup>1</sup> Renata Christha Auli, “ kejahatan perang : pengertian,jenis, dan peradilan” hukum online.com, 3 agustus 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-perang-pengertian-jenis-dan-peradilannya-lt62ea6d47bb087/> ( diakses pada 24 oktober 2023)

<sup>2</sup> Bakry umar suryadi, “Hukum Humaniter Internasional”,( Jakarta : Prenadamedia Group, 2019),hlm 2.

<sup>3</sup> Firmansyah fikri iman, satria unggul wicaksana prakasa. 2023 <https://repository.umsurabaya.ac.id/7113/1/9.%20Pertanggungjawaban%20Agresi%20Militer%20Rusia%20Terhadap%20Ukraina%20di%20Wilayah%20Donbass.pdf> ( diakses pada 29 oktober 2023)

<sup>4</sup> “Situation in Ukraine: ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova,International Criminal Court, 17 Maret 2023 ”<https://www.icc-cpi.int/news/situation-ukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vladimir-vladimirovich-putin-and> ( diakses pada 22 oktober 2023)

keputusan ICC ini sebagai "keputusan bersejarah yang akan memulai pertanggungjawaban bersejarah" Di sisi lain, Rusia tidak mengakui yurisdiksi ICC dan menyatakan bahwa keputusan tersebut "tidak memiliki arti bagi negara kami, termasuk dari segi hukum".

Beberapa pihak memuji keputusan ICC ini sebagai langkah penting dalam mengakhiri impunitas terhadap pelaku kejahatan perang. Balkees Jarrah, direktur asosiasi keadilan internasional di organisasi HAM Human Rights Watch, menyatakan bahwa surat perintah tersebut "mengirim pesan yang jelas bahwa memberi perintah untuk melakukan, atau mentolerir, kejahatan serius terhadap warga sipil dapat mengarah ke sel penjara di Den Haag". Bagaimanapun, pelaksanaan surat perintah ini dan dampaknya terhadap Putin dan Rusia masih menjadi pertanyaan yang belum terjawab.

## **PEMBAHASAN**

### **Kejahatan Yang Dilakukan Putin Di Ukraina**

Rusia melancarkan agresi ke Ukraina serta mengadakan serbuan dari segala penjuru. Hal ini dianggap sebagai “ Perang Putin” oleh semua negara .Tentara Rusia mendobrak Ukraina dari Utara,timur,serta selatan.Rusia dipandang sebagai ancaman bagi stabilitas Eropa.Perang Putin adalah konflik paling signifikan di Eropa sejak berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945.Seluruh tatanan keamanan Eropa dalam kondisi kacau balau saat Negara -negara NATO meningkatkan militer mereka dan mengirimkan sejumlah besar pasukan di sepanjang perbatasan negara itu dengan Rusia. Saat ini negara seluruh dunia menganggap ada diambang perang global ketiga.Beberapa instalasi militer dibom oleh pesawat tempur.Kherson,sebuah kota pelabuhan di Ukraina selatan.segera diambil alih pasukan Rusia. Secara resmi,Rusia tidak menyebut serangan ini sebagai perang, melainkan sebagai operasi militer khusus. Putin juga percaya bahwa kaum fanatic telah menguasai Ukraina. Mereka adalah ultranasionalis yang membenci Federasi Rusia. Di tengah tekanan rakyat, Presiden Ukraina Viktor Yunokovych terpaksa mengundurkan diri pada tahun 2014.. Yanukovych telah mendukung Rusia pada saat kemenangan pemilihannya pada tahun 2014. Akibatnya, Rusia menginvasi dan menduduki Krimea di Ukraina selatan.Rusia juga telah memberikan bantuan kepada organisasi separatis di Ukraina Timur dalam upaya mereka untuk memisahkan diri dari Ukraina.<sup>5</sup>

Presiden Rusia Vlandimir Putin telah melakukan kekerasan yang tak henti – hentinya yang menyebabkan kematian dan kehancuran diseluruh Ukraina. banyak nya laporan kredibel tentang serangan tanpa pandangan bulu dan serangan yang sengaja menargetkan warga sipil,serta kekejaman lainnya.Pasukan Rusia telah menghancurkan beberapa gedung apartemen, sekolah, rumah sakit, kendaraan sipil, pusat perbelanjaan, infrastruktur penting,dan ambulans, menyebabkan ribuan warga sipil yang tak berdosa terbunuh atau terluka. Banyak tempat – tempat yang diserang oleh pasukan Rusia telah diteridentifikasi secara jelas sebagai lokasi yang digunakan oleh warga sipil.Tempat tersebut termasuk rumah sakit bersalin Mariupol,sebagaimana ditegaskan oleh Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia dalam laporan tanggal 11 Maret.Pasukan Putin menggunakan taktik yang sama di Gronzy, Chechnya,dan Aleppo,Suriah, dimana mereka untuk melakukannya di Ukraina sekali lagi mengejutkan dunia dan, seperti yang telah dibuktikan oleh Presiden Zelensky, “ memandikan rakyat Ukraina dengan darah dan air mata.”<sup>6</sup>

Selain itu menurut komisi PBB juga mencatat temuan dan kekerasan berbasis seksual

---

<sup>5</sup>Firmansyah fikri iman, satria unggul wicaksana prakasa. 2023

<https://repository.umsurabaya.ac.id/7113/1/9.%20Pertanggungjawaban%20Agresi%20Militer%20Rusia%20Terhadap%20Ukraina%20di%20Wilayah%20Donbass.pdf> ( diakses pada 29 oktober 2023)

<sup>6</sup> “ kejahatan perang oleh pasukan rusia di ukraina. kedutaan besar dan konsultan AS di Indonesia, 23 maret 2022 ”<https://id.usembassy.gov/id/kejahatan-perang-oleh-pasukan-rusia-di-ukraina/> ( diakses pada tanggal 20 oktober 2023)

dan gender yang dilakukan oleh otoritas Rusia ketika mereka melakukan kunjungan dari rumah ke rumah di daerah yang berada dibawah kendali mereka,dan selama pengurangan yang melanggar hukum.adanya pemindahan anak – anak dari Ukraina ke Federasi Rusia, komisi PBB menyampaikan keprihatinan bahwa pelanggaran HAM dan hukum humaniter internasional telah dilakukan. Situasi mengenai pemindahan anak – anak yang telah diperiksa merupakan kejahatan perang, dan para saksi mengatakan kepada komisi bahwa banyak dari anak – anak yang lebih muda yang dipindahkan tidak dapat menjalin kontak dengan keluarga mereka dan mungkin kehilangan kontak dengan mereka selamanya.<sup>7</sup>

Deportasi ilegal atau pemindahan – pemindahan paksaan perorangan atau massal, anak-anak Ukraina ke Rusia oleh Presiden Vlandir Putin merupakan kejahatan terhadap Bagian Lv konvensi jenewa 1949 tentang perlindungan orang – orang diwaktu perang pada wilayah – wilayah yang diduduki. Pada pasal 49 dinyatakan bahwa pemindahan – pemindahan paksaan perorangan atau massal, demikian pula deportasi orang – orang yang dilindungi dari wilayah yang diduduki ke wilayah kekuasaan pendudukan atau ke wilayah negara lain, baik yang diduduki maupun tidak, adalah terlarang. Apapun alasan- alasannya .walaupun demikian, kekuasaan pendudukan dapat mengadakan pengungsian total atau sebagian dari suatu daerah tertentu, apabila keamanan penduduk atau alasan- alasan militer yang mendesak menghendaknya. Deportasi ilegal yang diduga dilakukan oleh Rusia terhadap anak – anak Ukraina keluar dari wilayah pendudukannya ( Ukraina) ke wilayah pendudukan (rusia) pada masa konflik bersenjata ini adalah dilarang dan merupakan kejahatan perang, oleh karena itu Presiden Rusia dan pejabat – pejabat militer maupun sipilnya harus di adili di Lcc Den Haag guna penegakan dan kepastian hukum.<sup>8</sup>

Tindakan – tindakann Rusia yang telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina,karena pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai *injury state* maupun pengenaan berbagai sanksi.Telah ada tuntutan maupun sanksi – sanksi yang diberikan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab. Pemberian sanksi – sanksi berupa denda atau kebijakan ekonomi merupakan hukuman bagi warga negara yang melakukan pelanggaran hukum.<sup>9</sup>

### **Konsekuensi Hukum yang akan di hadapi Putin jika ditangkap ICC**

Dalam kasus yang dilakukan Vlandimir Putin termasuk pada pelanggaran HAM, Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Rusia kepada warga negara Ukraina, menurut *prinsip the Restatement of the Foreign Relations Law of the United States 3rd* , yaitu negara Ukraina bias mengajukan tuntutan dengan menggunakan norma – norma hak asas manusia untuk melandasinya yang berasal dari *general principles of law recognized by civilized nations* .Telah diketahui, negara Ukraina telah menuntut negara Rusia ke *International court of justice* ( Mahkamah Internasional) atas invasi Rusia menunjukkan adanya tindakan genosida. Tindakan

---

<sup>7</sup> “ komisi PBB : Rusia lakukan pelanggaran, kejahatan perang di ukraina “, antaran news, 17 maret 2023<https://www.antaranews.com/berita/3445557/komisi-pbb-rusia-lakukan-pelanggaran-kejahatan-perang-di-ukraina> ( diakses pada 20 oktober 2023)

<sup>8</sup>Wiryadi uyan, Simanjutak Mangisi, Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina, agustus 2023.  
[https://www.researchgate.net/publication/373576316\\_PROSES\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_PRESIDEN\\_PUTI\\_N\\_ATAK\\_DUGAAN\\_KEJAHATAN\\_PERANG\\_DALAM\\_AGRESI\\_RUSIA\\_KE\\_UKRAINA](https://www.researchgate.net/publication/373576316_PROSES_HUKUM_TERHADAP_PRESIDEN_PUTI_N_ATAK_DUGAAN_KEJAHATAN_PERANG_DALAM_AGRESI_RUSIA_KE_UKRAINA) ( diakses pada tanggal 25 Oktober 2023)

<sup>9</sup> Sudiq Rio Dwinanda,Levina Yustitianiingtyas, “ Intervensi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 sebagai pelanggaran HAM,3 september 2022  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/51278/22701> ( diakses pada 29 oktober 2023)

genosida termasuk ke dalam pelanggaran hak hidup karena menyebabkan kematian, hak hidup merupakan salah satu hak yang diatur dalam di Konvensi Eropa untuk Perlindungan Hak Asasi dan Kebebasan Fundamental Manusia.<sup>10</sup>

Penangkapan Vlandimir Putin dan Pejabat Rusia lainnya untuk diproses hukum dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional karena tidak ada keinginan negara Rusia untuk menangkap dan mengadili Presiden dan pejabat – pejabat negaranya sendiri. Oleh karena itu, Mahkamah Pidana Internasional harus bertindak mengadili guna kepentingan hukum seluruh dunia. Asas Universalitas menyatakan bahwa undang – undang hukum pidana dapat diberlakukan terhadap siapapun yang melanggar kepentingan hukum dari seluruh dunia. Yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan asas universalitas adalah kepentingan hukum seluruh dunia. Proses hukum yang dilakukan yang diduga telah melakukan kejahatan perang dilakukan tegaknya atau berfungsinya suatu norma – norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat internasional. sebelum dilaksanakan persidangan maka dapat dilakukan sidang Pra-peradilan sesuai dengan pasal 57 Statuta Roma. Pra-Peradilan merupakan suatu tindakan yang dilakukan memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitas yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan. Apabila penangkapan dan penahanan dinyatakan sah, maka persidangan dapat dilanjutkan ke sidang pengadilan Dalam melaksanakan fungsi dan kekuasaannya, suatu sidang Pengadilan harus sesuai dengan ketentuan- ketentuan Statuta Roma serta Hukum Acara dan pembuktian. Suatu persidangan harus berlangsung adil dan cepat, menghormati hak-hak tertuduh, dan memberikan perhatian pada perlindungan saksi dan korban.<sup>11</sup> Jika Vladimir Putin ditangkap oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC), ada beberapa konsekuensi hukum yang mungkin dihadapinya:

- **Kemungkinan merusak kemampuan Putin untuk bepergian dengan bebas dan bertemu dengan para pemimpin dunia lainnya.** Meskipun tidak ada jaminan bahwa dia akan ditahan di sel Den Haag, surat perintah penangkapan kejahatan perangnya dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bepergian internasional.<sup>12</sup>
- **Wajib menahan dan memindahkan Putin jika dia menginjakkan kaki di wilayah mereka.** Sebanyak 123 negara anggota ICC memiliki kewajiban hukum untuk menahan dan menyerahkan Putin jika dia berada di wilayah mereka. Namun, Rusia bukan anggota ICC, jadi tidak ada kewajiban serupa bagi negara tersebut.<sup>13</sup>
- **Tidak adanya pasukan atau polisi ICC yang memiliki kapasitas untuk menangkap orang yang diberi surat penangkapan.** ICC harus mengandalkan pihak ketiga, seperti negara anggota atau lembaga penegak hukum internasional lainnya, untuk membantu menangkap dan menyerahkan Putin.
- **Kekuatan veto Rusia di Dewan Keamanan PBB.** Rusia adalah negara besar pemegang veto di Dewan Keamanan PBB, yang dapat mempengaruhi kemampuan ICC untuk menangkap dan menghukum Putin.<sup>14</sup>

---

<sup>10</sup> Sudiq Rio Dwindi, Loc.Cit.

<sup>11</sup> Wiryadi uyan, Simanjutak Mangisi, Proses Hukum Terhadap Presiden Putin Atas Dugaan Kejahatan Perang Dalam Agresi Rusia Ke Ukraina, agustus 2023.

[https://www.researchgate.net/publication/373576316\\_PROSES\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_PRESIDEN\\_PUTI\\_N\\_ATAS\\_DUGAAN\\_KEJAHATAN\\_PERANG\\_DALAM\\_AGRESI\\_RUSIA\\_KE\\_UKRAIN](https://www.researchgate.net/publication/373576316_PROSES_HUKUM_TERHADAP_PRESIDEN_PUTI_N_ATAS_DUGAAN_KEJAHATAN_PERANG_DALAM_AGRESI_RUSIA_KE_UKRAIN) ( diakses pada tanggal 25 oktober 2023)

<sup>12</sup> Ida rosdalina, 20 maret 2023. <https://dunia.tempo.co/read/1704828/icc-menerbitkan-surat-penangkapan-putin-apa-konsekuensinya> ( di akses pada 25 Oktober 2023)

<sup>13</sup> Cnn Indonesia, 25 maret 2023. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230324151931-134-928956/negara-icc-mana-saja-yang-ogah-tangkap-putin>

<sup>14</sup> Sdn negeri 006 batam ,2016. <https://sdn006batamkota.sch.id/read/223/hak-veto-dewan-keamanan-pbb>

- **Penolakan Kremlin terhadap tuduhan ICC.** Pemerintah Rusia telah menolak tuduhan ICC terhadap Putin dan menyatakan bahwa keputusan ICC tidak memiliki arti bagi Rusia, termasuk dari sudut pandang hukum.
- **Ketidakpastian tentang proses hukum dan kemungkinan Putin menyerahkan diri ke ICC.** Sulit membayangkan bahwa Putin akan menyerahkan diri ke ICC, dan ada ketidakpastian tentang sejauh mana proses hukum dapat berjalan mengingat situasi ini.
- Dengan demikian.

### **Tanggapan Pemerintah Rusia Terhadap Surat Perintah Penangkapan Putin Oleh ICC**

Pada tanggal 18 Maret 2023, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Ukraina, termasuk deportasi warga sipil secara ilegal dan membawa paksa anak-anak dari wilayah yang dikuasai Rusia ke wilayah Rusia. Berikut adalah tanggapan pemerintah Rusia terhadap surat perintah penangkapan tersebut:

- Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menyatakan bahwa menangkap Presiden Rusia berdasarkan surat perintah penangkapan ICC adalah sama dengan menyatakan perang kepada Rusia.
- Medvedev juga mempertanyakan kompetensi Menteri Kehakiman Jerman, Marco Buschmann, yang mengatakan bahwa jika Putin berada di Jerman, maka Jerman akan menangkapnya.<sup>15</sup>
- Juru bicara pemerintah Rusia, Dmitry Peskov, merespons santai surat perintah penangkapan ICC dan menyatakan bahwa Rusia tidak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut, sehingga keputusan pengadilan dianggap batal dari sudut pandang hukum.<sup>16</sup>
- Pejabat Rusia meyakini bahwa surat perintah penangkapan Putin dikeluarkan atas permintaan Amerika Serikat dan akibatnya tidak ada yang akan diadili oleh pengadilan internasional.<sup>17</sup>
- Para pakar meragukan kemungkinan penangkapan Putin karena ICC tidak memiliki pasukan kepolisian sendiri dan hanya bisa mengandalkan negara lain untuk melakukan penangkapan<sup>18</sup>. Selain itu, kecil pula kemungkinan Putin mau pergi ke negara lain yang berpotensi menangkapnya.
- Rusia merespons surat perintah penangkapan ICC dengan mengadakan pertemuan dengan Presiden China, Xi Jinping, untuk menandatangani perjanjian yang mengantarkan era baru hubungan antara kedua negara.

Adapun Tanggapan negara lain terhadap surat penangkapan:

Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh International Criminal Court (ICC) terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dengan tuduhan melakukan kejahatan perang di

---

<sup>15</sup> Andri saubani “ Medvedev: Menangkap Putin Sama Dengan Menyatakan Perang dengan Rusia, 23 Maret 2023, Republika.”<https://internasional.republika.co.id/berita/rrzdiu409/medvedev-menangkap-putin-sama-dengan-menyatakan-perang-dengan-rusia> ( diakses pada 19 oktober 2023)

<sup>16</sup>“ kremlin : peritah pennangkapan putin oleh icc tak ada artinya”, Antara news,18 Maret 2023. <https://www.antaraneews.com/berita/3447171/kremlin-perintah-penangkapan-putin-oleh-icc-tak-ada-artinya> ( diakses pada 19 oktober 2023)

<sup>17</sup> “ ini tanggapan rusia atas perintah penangkapan putin yang didakwa melakukan kejahatan perang diukraina”, Antara news,24 maret 2023.<https://sumbar.antaraneews.com/berita/560688/ini-tanggapan-rusia-atas-perintah-penangkapan-putin-yang-didakwa-melakukan-kejahatan-perang-di-ukraina> ( diakses pada 19 oktober 2023)

<sup>18</sup> “ ICC perintahkan penangkapan, mungkin putin ditangkap?. CNN Indonesia, 20 maret 2023.”<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230320133011-134-927283/icc-perintahkan-penangkapan-mungkinkah-putin-ditangkap> ( diakses pada 19 oktober 2023)

Ukraina telah menimbulkan berbagai tanggapan dari dunia internasional. Berikut adalah beberapa tanggapan yang diberikan oleh negara-negara dan pihak terkait:

- **Rusia:** Rusia menolak surat perintah penangkapan tersebut dan menyatakan bahwa keputusan ICC secara hukum batal. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa Rusia, seperti sejumlah negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, bahkan menyatakan bahwa menangkap Putin berdasarkan surat perintah penangkapan ICC adalah sama dengan menyatakan perang kepada Rusia
- **Ukraina:** Ukraina memuji keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin. Menurut mereka, ini adalah tanda bahwa roda keadilan sedang berputar
- **Negara-negara anggota ICC:** Langkah ICC mewajibkan 123 negara anggota pengadilan untuk menangkap Putin dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili, jika dia menginjakkan kaki di wilayah mereka. Namun, belum ada laporan yang menyebutkan tindakan konkret dari negara-negara anggota ICC terkait dengan surat perintah penangkapan ini.

Pihak lain: Beberapa pihak mengkritik keputusan ICC, dengan alasan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi yang cukup untuk mengadili kepala negara. Mereka juga menyoroti fakta bahwa negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China tidak menjadi anggota ICC.

## **KE S I M P U L A N**

Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin atas tuduhan melakukan kejahatan perang di Ukraina, termasuk deportasi warga sipil secara ilegal dan membawa paksa anak-anak dari wilayah yang dikuasai Rusia ke wilayah Rusia. Berikut adalah tanggapan pemerintah Rusia terhadap surat perintah penangkapan tersebut, Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, menyatakan bahwa menangkap Presiden Rusia berdasarkan surat perintah penangkapan ICC adalah sama dengan menyatakan perang kepada Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan bahwa Rusia, seperti sejumlah negara lain, tidak mengakui yurisdiksi pengadilan ini. Wakil Kepala Dewan Keamanan Rusia, Dmitry Medvedev, bahkan menyatakan bahwa menangkap Putin berdasarkan surat perintah penangkapan ICC adalah sama dengan menyatakan perang kepada Rusia. Ukraina: Ukraina memuji keputusan ICC yang mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Putin. Menurut mereka, ini adalah tanda bahwa roda keadilan sedang berputar. Negara-negara anggota ICC: Langkah ICC mewajibkan 123 negara anggota pengadilan untuk menangkap Putin dan memindahkannya ke Den Haag untuk diadili, jika dia menginjakkan kaki di wilayah mereka. Namun, belum ada laporan yang menyebutkan tindakan konkret dari negara-negara anggota ICC terkait dengan surat perintah penangkapan ini. Tindakan – tindakann Rusia yang telah menimbulkan berbagai kerugian bagi negara Ukraina, karena pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh negara Rusia bagi negara Ukraina sebagai injury state maupun pengenaan berbagai sanksi. Telah ada tuntutan maupun sanksi – sanksi yang diberikan kepada negara Rusia dari berbagai pihak sebagai bentuk hukuman bagi Rusia agar bersedia bertanggung jawab.

Konsekuensi Hukum yang akan di hadapi Putin jika ditangkap ICC. Penangkapan Vladimir Putin dan Pejabat Rusia lainnya untuk diproses hukum dilakukan oleh Mahkamah Pidana Internasional karena tidak ada keinginan negara Rusia untuk menangkap dan mengadili Presiden dan pejabat – pejabat negaranya sendiri. Yang menjadi dasar hukum bagi pemberlakuan asas universalitas adalah kepentingan hukum seluruh dunia. Proses hukum yang dilakukan yang diduga telah melakukan kejahatan perang dilakukan tegaknya atau

berfungsinya suatu norma – norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat internasional. sebelum dilaksanakan persidangan maka dapat dilakukan sidang Pra-peradilan sesuai dengan pasal 57 Statuta Roma. Pra-Peradilan merupakan suatu tindakan yang dilakukan memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan dan memutus permintaan ganti kerugian serta rehabilitas yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke sidang pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bakry umar suryadi, “Hukum Humaniter Internasional”, ( Jakarta : Prenadamedia Group, 2019), hlm 2.
- Auli, R. C. (2023, agustus). kejahatan perang : pengertian, jenis, dan peradilan. Retrieved from hukum online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kejahatan-perang-pengertian-jenis-dan-peradilannya-lt62ea6d47bb087/> (
- Court, I. C. (2023, maret). situation in Ukraine : ICC judge s issue arrest warrants agaibst Vlandimir Vlandiniovich Putin and Maria. Retrieved from International Criminal Court: <https://www-icc-cpi.int/news/situationukraine-icc-judges-issue-arrest-warrants-against-vlandimir-vladimirovich-putin-and>
- Firmansyah fikri iman, S. u. (2023). pertanggungjawaban agresi militer rusia terhadap ukraina di wilayah donbass. Retrieved from repository.um-surabaya.ac.id: <https://repository.um-surabaya.ac.id/7113/1/9.%20Pertanggungjawaban%20Agresi%20Militer%20Rusia%20Terhadap%20Ukraina%20di%20Wilayah%20Donbass.pdf>
- Indonesia, C. (2023, maret). ICC perintah penangkapan, mungkin putin ditangkap. Retrieved from Cnn Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230320133011-134-927283/icc-perintahkan-penangkapan-mungkinkah-putin-ditangkap>
- Indonesia, K. b. (2022, Maret). Kejahatan perang oleh pasukan rusia di ukraina. Retrieved from Kedutaan besar dan konsultan AS di Indonesia: <https://id.usembassy.gov/id/kejahatan-perang-oleh-pasukan-rusia-di-ukraina/>
- Kota, S. n. (2016, agustus). Hak Veto Dewan keamanan. Retrieved from Sdn negeri 006 Batam kota: <https://sdn006batamkota.sch.id/read/223/hak-veto-dewan-keamanan-pbb>
- news, A. (2023, maret). Kremlin: perintah penangkapan putin oleh icc tidak ada artinya. Retrieved from Antara news: <https://www.antaraneews.com/berita/3447171/kremlin-perintah-penangkapan-putin-oleh-icc-tak-ada-artinya> (
- saubani, A. (2023, maret). Mey dey : Menyatakan perang dengan rusia. Retrieved from Republika: <https://internasional.republika.co.id/berita/rrzdiu409/medvedev-menangkap-putin-sama-dengan-menyatakan-perang-dengan-rusia>
- Sudiq Rio Dwinanda, L. Y. (2022, september). Intervensi Rusia Terhadap Ukraina Pada Tahun 2022 Sebagai Pelanggaran HAM Berat. Retrieved from ejournal.undiksha.ac.id: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/51278/22701>
- Wiryadi uyan, S. M. (2023, agustus). Proses Hukum terhadap Presiden Putin atas dugaan kejahatan perang dalam agresi Rusia ke Ukraina. Retrieved from researchgate: [https://www.researchgate.net/publication/373576316\\_PROSES\\_HUKUM\\_TERHADAP\\_PRESIDEN\\_PUTIN\\_ATAS\\_DUGAAN\\_KEJAHATAN\\_PERANG\\_DALAM\\_AGRESI\\_RUSIA\\_KE\\_UKRAI](https://www.researchgate.net/publication/373576316_PROSES_HUKUM_TERHADAP_PRESIDEN_PUTIN_ATAS_DUGAAN_KEJAHATAN_PERANG_DALAM_AGRESI_RUSIA_KE_UKRAI).